Penguatan Literasi Kewarganegaraan Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Warga

Yayuk Hidayah[1]*, Nabila Ihza Nur Muttaqi[2], Meiwatizal Trihastuti[3] , [4] Nita Maghfiratul Jannah
[1,2,4] Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
[3] STKIP Pasundan, Cimahi, Indonesia
*Email: yayukhidayah@uny.ac.id

Abstract. *Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengembangkan model Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kemasyarakatan berbasis komunitas untuk penguatan literasi kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warga. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya literasi kewarganegaraan dan partisipasi politik bermakna di tingkat akar rumput, meskipun kerangka hukum dan kelembagaan demokrasi di Indonesia telah relatif mapan. Penelitian dirancang sebagai penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D). Namun, artikel ini secara tegas hanya melaporkan tahap pertama R&D, yakni studi pendahuluan sebagai dasar perancangan model yang lebih komprehensif. Pada tahap awal R&D ini digunakan pendekatan mixed-method melalui survei literasi kewarganegaraan dan partisipasi politik warga, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan lokal untuk memetakan kondisi aktual, kebutuhan, dan problematik kewarganegaraan di tingkat akar rumput. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pengetahuan, sikap, dan praktik kewarganegaraan warga. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan warga berada pada kategori rendah–sedang, dengan kecenderungan partisipasi politik yang masih bersifat prosedural dan sporadis. Temuan ini mengungkap sejumlah kebutuhan utama, antara lain penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga, penanaman nilai dan norma demokratis, serta pelatihan keterampilan partisipatif yang relevan dengan konteks lokal dan dinamika sosial masyarakat.Tahap pertama R&D ini menghasilkan peta masalah dan kebutuhan kewarganegaraan komunitas yang komprehensif. Temuan tersebut menjadi landasan empiris dan konseptual bagi perancangan prototipe model PKn kemasyarakatan berbasis komunitas pada tahap pengembangan berikutnya, serta memberikan arah yang lebih terukur bagi intervensi pendidikan kewarganegaraan di komunitas lokal yang beragam.*

***Keywords**: literasi kewarganegaraan; partisipasi politik; Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan; pendidikan berbasis komunitas; demokrasi lokal*

PENDAHULUAN

Penguatan literasi kewarganegaraan berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi politik warga, terutama di tingkat akar rumput. Meskipun demokrasi elektoral sering dipuji sebagai langkah maju dalam transisi politik, tantangan besar masih muncul ketika melihat partisipasi politik yang terjadi. Proseduralnya mungkin tampak tinggi, namun pada kenyataannya, keterlibatan politik warga seringkali dangkal dan tidak substansial. Untuk itu, penting bagi komunitas untuk aktif berperan dalam membangun literasi kewarganegaraan yang mendalam, yang mencakup pemahaman tentang hak, kewajiban, serta nilai-nilai demokrasi. Febiantoni, F. F. et al (2025) mengungkapkan bahwa penguatan pendidikan karakter di sekolah tidak cukup hanya melibatkan guru, tetapi juga perlu melibatkan orang tua dan komunitas. Dengan demikian, generasi yang dibentuk akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan pemahaman yang lebih baik dan komitmen yang kuat terhadap demokrasi.

Berbagai inisiatif pendidikan kewarganegaraan yang ada selama ini cenderung terpusat di ruang formal seperti sekolah, kampus, atau program pelatihan yang berorientasi sertifikasi. Hal ini menandakan adanya kebutuhan untuk melibatkan lebih banyak konteks praktis di luar ruang kelas untuk memperkuat karakter kewarganegaraan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Putri, S. A., et al (2025) mengungkapkan pentingnya program luar sekolah sebagai sarana untuk menanamkan karakter kewarganegaraan pada siswa. Mereka menilai bahwa pendidikan yang berbasis pada kepedulian lingkungan dan sosial dapat membentuk sikap kewarganegaraan yang lebih holistik dan aplikatif, yang tidak hanya terbatas pada teori tetapi juga praktik yang dilakukan di luar ruang kelas, seperti melalui program-program berbasis lingkungan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu dijembatani dengan berbagai aktivitas yang melibatkan peserta didik dalam aksi nyata, sehingga nilai-nilai kewarganegaraan dapat diinternalisasi dengan lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Inisiatif pendidikan kewarganegaraan di ruang formal sering kali gagal menyentuh dinamika kehidupan warga di level komunitas, tempat praktik kewargaan sehari-hari sesungguhnya berlangsung, seperti di RT/RW, kelompok keagamaan, organisasi pemuda, komunitas perempuan, hingga jaringan relawan lokal. Sebagai contoh, Gal (2024) menunjukkan bahwa melalui hackathon yang melibatkan berbagai pihak seperti siswa, pendidik, ahli burung, dan profesional di bidang teknologi tinggi, lingkungan dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kewarganegaraan berbasis pada kepedulian lingkungan di kalangan siswa kelas lima. Namun, di titik inilah muncul jarak antara wacana kewarganegaraan demokratis yang normatif dengan praktik politik yang pragmatis dan penuh kompromi. Warga mungkin mengetahui jargon-jargon demokrasi dan hak asasi, tetapi tidak memiliki ruang kolektif untuk memaknai, merundingkan, dan mempraktikkannya dalam persoalan konkret seperti akses layanan publik, anggaran desa, lingkungan hidup, atau kebijakan sosial. Wu (2020) menjelaskan jika tanpa jembatan yang menghubungkan pengetahuan kewarganegaraan dengan konteks komunitas, literasi kewarganegaraan akan mengendap sebagai "pengetahuan mati" yang tidak bertransformasi menjadi partisipasi politik bermakna

Komunitas memiliki potensi besar untuk menjadi ekosistem pembelajaran kewarganegaraan yang hidup, dialogis, dan transformatif. Sebagai ruang di mana warga dapat berinteraksi dan berbagi pengetahuan, komunitas dapat memainkan peran penting dalam memperkuat literasi kewarganegaraan, menjadikannya lebih

relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Knowles, R. T. (2018) komunitas dapat menjadi tempat yang efektif untuk menghubungkan ideologi pendidikan kewarganegaraan dengan strategi pengajaran yang mendalam dan reflektif. Proses ini tidak hanya membentuk pemahaman teoritis tentang kewarganegaraan, tetapi juga membangun keterampilan praktis yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial, menjadikan setiap individu lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Relasi sosial yang relatif dekat, pengalaman bersama menghadapi masalah lokal, dan adanya struktur informal yang fleksibel membuat komunitas menjadi ruang strategis untuk mengembangkan literasi kewarganegaraan yang kontekstual, kritis, sekaligus berorientasi aksi. Melalui forum warga, diskusi kampung, kelompok kepentingan lokal, atau inisiatif berbasis komunitas lainnya, warga dapat menguji gagasan tentang keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas dalam situasi nyata, bukan hanya di atas kertas. Namun, potensi ini sering kali tidak terkelola secara sistematis. Program-program yang datang dari luar komunitas, seperti yang dijelaskan oleh Nestler, Lüdtke, dan Robitzsch (2021), sering kali bersifat top-down, berbasis proyek jangka pendek, dan tidak memberikan ruang kepemilikan (ownership) bagi warga untuk mengembangkan agenda literasi kewarganegaraan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan Jang et al. (2021) yang mengungkapkan pentingnya relasi sosial yang kuat dalam meningkatkan partisipasi sosial. Akibatnya, setelah proyek berakhir, efeknya terhadap kapasitas kritis dan partisipasi politik warga pun memudar.

Dalam konteks itulah, penguatan literasi kewarganegaraan berbasis komunitas menjadi agenda strategis untuk menggeser paradigma dari sekadar "mendidik warga untuk taat aturan" menuju "mendampingi warga agar mampu menjadi subjek politik yang reflektif dan bertanggung jawab". Keegan (2021) mengemukakan bahwa literasi kewarganegaraan yang bersifat kritis dan afektif harus memperhatikan emosi politik di ruang kelas sosial, yang dapat menjadi titik awal dalam mendorong pemahaman politik yang lebih mendalam dan reflektif. Pendekatan berbasis komunitas menempatkan warga bukan sebagai objek penyuluhan, tetapi sebagai aktor utama yang mendefinisikan masalah, merumuskan prioritas, dan merancang strategi advokasi. Literasi kewarganegaraan dalam kerangka ini harus mencakup tiga dimensi sekaligus: kognitif (pengetahuan tentang sistem politik, hak, dan mekanisme partisipasi), afektif (nilai dan sikap demokratis seperti keadilan, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan), serta behavioral (keterampilan berpartisipasi, berdialog, bernegosiasi, dan mengawasi kekuasaan). Hal ini sejalan dengan pemikiran Gibbs (2023) yang menekankan pentingnya pendidikan kritis kewarganegaraan yang berakar pada studi etnis untuk memperkenalkan perspektif yang lebih holistik terhadap keadilan sosial. Ketiga dimensi tersebut perlu dibangun melalui proses pembelajaran partisipatoris yang terhubung dengan isu-isu riil di level komunitas, bukan melalui ceramah satu arah atau kampanye normatif yang abstrak.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa demokrasi yang tangguh tidak dapat hanya bergantung pada desain institusi formal, tetapi membutuhkan warga dengan literasi kewarganegaraan yang kuat dan partisipasi politik yang berakar pada pengalaman komunitas. Polizzi (2021) mengemukakan bahwa literasi digital kritis dan keterlibatan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pengalaman nyata masyarakat dalam proses politik. Menurut Polizzi, gambaran utopia dan distopia yang dibangun oleh pengguna internet dalam era

digital juga dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana literasi digital mempengaruhi sikap dan tindakan politik warga. Dalam konteks ini, partisipasi politik yang efektif tidak hanya bergantung pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada pengalaman kolektif yang terhubung dengan isu-isu riil yang dihadapi masyarakat, mengarah pada demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas

Tujuan utama artikel ini adalah menganalisis bagaimana penguatan literasi kewarganegaraan berbasis komunitas dapat menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik warga, dari yang semula bersifat pasif-prosedural menjadi aktif-kritis dan berorientasi pada perubahan sosial. Secara khusus, artikel ini akan mengurai secara konseptual hubungan antara literasi kewarganegaraan, komunitas sebagai ruang belajar demokrasi sehari-hari, serta bentuk-bentuk partisipasi politik warga yang lebih substantif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat menawarkan kerangka pemikiran dan landasan praktis bagi perancang kebijakan, pendidik, dan penggerak komunitas untuk merumuskan intervensi yang lebih relevan dan efektif dalam memperkuat demokrasi dari bawah.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan demokrasi yang relatif mapan, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan dan partisipasi politik warga di tingkat akar rumput masih berada pada kategori rendah–sedang serta cenderung bersifat prosedural dan sporadis. Warga umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai serta norma demokratis, maupun keterampilan partisipatif yang diperlukan untuk terlibat secara kritis dan bertanggung jawab dalam proses politik lokal. Di sisi lain, inisiatif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kemasyarakatan yang dirancang secara sistematis dan berbasis komunitas masih terbatas, belum terbangun dalam bentuk model yang teruji dan kontekstual dengan kebutuhan warga. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ideal-ideal demokrasi yang tercantum dalam regulasi dengan praktik kewarganegaraan yang hidup di komunitas lokal.

METODE PENELITIAN

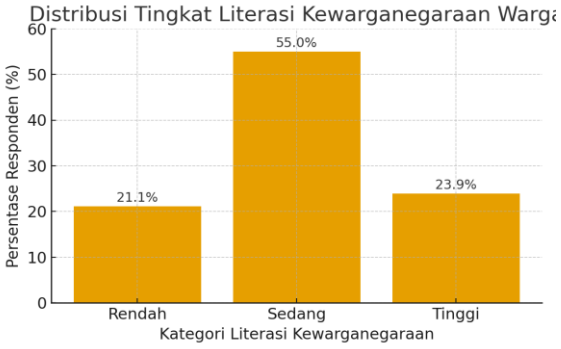
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) untuk mengembangkan dan pada akhirnya menguji efektivitas model Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kemasyarakatan berbasis komunitas dalam penguatan literasi kewarganegaraan dan peningkatan partisipasi politik warga. Namun, artikel ini secara khusus melaporkan tahap pertama R&D, yaitu studi pendahuluan. Pada tahap ini, penelitian menggunakan pendekatan *mixed-method* melalui survei literasi kewarganegaraan dan partisipasi politik warga, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan lokal guna memetakan kondisi aktual, kebutuhan, dan problematik kewarganegaraan di tingkat akar rumput. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Hasil tahap pertama menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan warga berada pada kategori rendah–sedang, dengan kecenderungan partisipasi politik yang masih bersifat prosedural dan sporadis. Temuan ini sekaligus mengidentifikasi sejumlah kebutuhan utama antara lain penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga, penanaman nilai dan norma demokratis, serta pelatihan keterampilan partisipatif yang akan menjadi dasar perancangan model PKn kemasyarakatan berbasis komunitas pada tahap R&D berikutnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

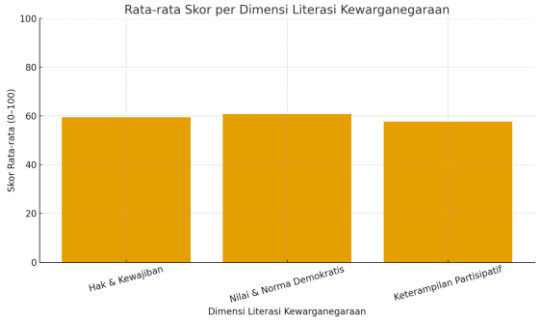
Bagian ini menyajikan hasil studi pendahuluan sebagai fase pertama dari penelitian dan pengembangan (R&D) model PKn kemasyarakatan berbasis komunitas. Fokus utamanya adalah memetakan tingkat literasi kewarganegaraan dan pola partisipasi politik warga di tingkat akar rumput sebagai dasar kebutuhan pengembangan model. Data diperoleh melalui survei kuantitatif terhadap warga, yang diperkaya dengan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat serta analisis dokumen kebijakan lokal. Dengan cara ini, gambaran yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan angka-angka statistik, tetapi juga konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Untuk memperjelas kecenderungan temuan, hasil analisis deskriptif divisualisasikan dalam tiga grafik utama: distribusi kategori literasi kewarganegaraan, rata-rata skor tiap dimensi literasi, serta tingkat partisipasi politik warga berdasarkan jenis keterlibatan. Grafik-grafik tersebut menjadi pijakan untuk membaca secara lebih tajam posisi warga sebagai subjek kewarganegaraan: sejauh mana mereka memahami hak dan kewajiban, menghayati nilai dan norma demokratis, serta terlibat dalam proses politik di lingkungannya. Berdasarkan landasan ini, bagian berikut akan menguraikan hasil secara rinci dan mendiskusikannya dalam kerangka penguatan PKn kemasyarakatan dan demokrasi lokal.

Gambar 1. Distribusi kategori literasi kewarganegaraan responden

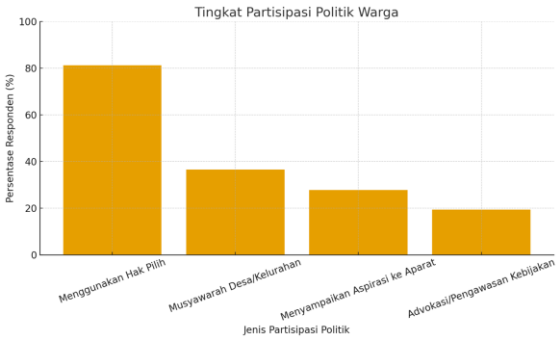


Gambar 2. Rata-rata skor per dimensi literasi kewarganegaraan



Rata-rata skor (0–100) untuk setiap dimensi literasi kewarganegaraan, meliputi pemahaman hak dan kewajiban warga negara, nilai dan norma demokratis, serta keterampilan partisipatif. Terlihat bahwa ketiga dimensi berada pada kisaran skor sedang, dengan dimensi keterampilan partisipatif menunjukkan nilai relatif paling rendah sehingga memerlukan intervensi penguatan yang lebih intensif.

Gambar 3. Tingkat partisipasi politik warga berdasarkan jenis partisipasi



Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum literasi kewarganegaraan warga masih berada pada kategori rendah–sedang. Rerata skor literasi sebesar 61,3 dalam skala 0–100, dengan 21,1% responden berada pada kategori rendah, 55,0% kategori sedang, dan hanya 23,9% yang masuk kategori tinggi. Komposisi ini menandakan bahwa basis pengetahuan dan kesadaran kewargaan di tingkat akar rumput belum cukup kokoh untuk

menopang praktik kewarganegaraan yang kritis dan partisipatif. Kondisi ini dapat dibaca sebagai akumulasi dari tradisi pendidikan kewarganegaraan yang cenderung normatif dan berorientasi hafalan, serta keterbatasan ruang belajar kewargaan di luar lembaga sekolah yang benar-benar menyentuh pengalaman hidup warga.

Jika ditelusuri per dimensi, ketiga dimensi literasi kewarganegaraan—pemahaman hak dan kewajiban, pemahaman nilai dan norma demokratis, serta keterampilan partisipatif—menunjukkan skor rata-rata yang relatif serupa, yaitu 59,4; 60,8; dan 57,6. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan hanya "kurang tahu", tetapi juga "kurang menghayati" dan "kurang terampil" dalam mempraktikkan kewargaan demokratis. Kesenjangan paling jelas tampak pada dimensi keterampilan partisipatif: warga belum terbiasa mengartikulasikan kepentingan, menyampaikan pendapat secara sistematis, dan mengelola perbedaan melalui dialog. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pendidikan ke depan tidak cukup berfokus pada pengayaan materi, tetapi harus menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan warga berlatih mengambil posisi, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama.

Pola yang sama tampak pada data partisipasi politik. Meskipun 81,2% responden menyatakan selalu atau sering menggunakan hak pilih, partisipasi non-elektoral justru sangat terbatas: hanya 36,5% yang pernah terlibat dalam musyawarah desa/kelurahan, 27,8% yang pernah menyampaikan aspirasi kepada aparat, dan 19,4% yang terlibat dalam advokasi atau pengawasan kebijakan. Temuan ini menggambarkan wajah kewarganegaraan yang prosedural: warga hadir ketika dimobilisasi pada momentum pemilu, tetapi kurang terlibat dalam proses deliberasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan kebijakan sehari-hari. Dengan kata lain, demokrasi elektoral belum sepenuhnya bertransformasi menjadi demokrasi partisipatoris yang bertumpu pada keterlibatan warga secara berkelanjutan.

Dalam kerangka penelitian dan pengembangan, hasil tahap pendahuluan ini memberikan landasan empirik yang kuat untuk merancang model Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kemasyarakatan berbasis komunitas. Peta masalah yang teridentifikasi—terutama rendahnya literasi pada tiga dimensi kewarganegaraan dan dominannya partisipasi politik yang hanya bersifat prosedural—menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan model yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai dan norma demokratis yang relevan dengan konteks sosial masyarakat. Seiring dengan itu, pelatihan keterampilan partisipatif yang melibatkan warga dalam ruang-ruang komunitas seperti forum warga, pertemuan RT/RW, dan organisasi keagamaan, menjadi elemen penting yang harus terintegrasi dalam model ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahl (2020) bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi yang tidak hanya terbatas pada prosedur, tetapi juga pada penguatan pemahaman ekonomi dan sosial yang inklusif. Selain itu, penelitian Stray (2019) tentang strategi kontra-disinformasi dalam demokrasi berbasis jaringan, memberikan perspektif penting tentang bagaimana literasi politik harus diimbangi dengan keterampilan kritis terhadap informasi yang berkembang di ruang-ruang sosial masyarakat. Dengan demikian, model PKn kemasyarakatan berbasis komunitas ini diharapkan dapat menciptakan warga negara yang tidak hanya tahu hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi

Dengan demikian, tahap berikutnya dalam R&D bukan sekadar menyusun paket materi, tetapi merancang skenario belajar partisipatoris yang menjadikan warga sebagai subjek pembelajaran, sehingga literasi

kewarganegaraan yang semula lemah dan terfragmentasi dapat bergerak menuju kewargaan yang lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan politik di tingkat lokal. Mirra dan Garcia (2022) menyoroti bagaimana literasi kewarganegaraan dapat diperkuat melalui pendekatan spekulatif yang memungkinkan remaja membayangkan masa depan sosial mereka, termasuk dalam konteks demokrasi dan keadilan sosial. Dalam penelitian mereka, kedua penulis menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan keterlibatan aktif siswa dalam merumuskan dan menggambarkan masa depan sosial mereka dapat membentuk pemikiran kritis dan meningkatkan kesadaran politik di tingkat individu dan komunitas. Dengan demikian, literasi kewarganegaraan yang terfragmentasi dapat terintegrasi kembali dan bergerak menuju tindakan politik yang lebih reflektif dan bertanggung jawab.

Efektivitas model Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kemasyarakatan berbasis komunitas dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan terbukti signifikan, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model ini berhasil meningkatkan literasi kewarganegaraan warga pada tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan partisipatif. Model ini tidak hanya mengembangkan pemahaman teoritis tentang kewarganegaraan, tetapi juga memperkuat sikap positif terhadap partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta keterampilan praktis dalam berinteraksi di ruang-ruang komunitas. Pendekatan berbasis komunitas ini mengintegrasikan pemahaman yang lebih dalam terhadap demokrasi dan keterlibatan warga, sesuai dengan pandangan Langmead (2019) yang menekankan pentingnya keberagaman ekonomi dan kinerja demokrasi dalam koperasi pekerja, serta penelitian France dan Martini (2019) yang membahas dampak korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Brasil sebagai konteks global yang relevan untuk pengembangan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan transparan.Secara empiris tampak adanya peningkatan skor sebelum–sesudah intervensi dan perbedaan yang jelas antara kelompok intervensi dan pembanding. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dirancang secara kontekstual, partisipatoris, dan terhubung dengan persoalan nyata di komunitas lebih mampu mengubah cara berpikir dan cara bertindak warga dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat informatif dan tekstual.

Dampak penguatan literasi kewarganegaraan terhadap kualitas partisipasi politik warga sangat signifikan, terutama melalui program PKn kemasyarakatan yang dapat mengubah kualitas partisipasi politik warga. Program ini berkontribusi pada pergeseran dari sekadar partisipasi prosedural dan sporadis menuju partisipasi yang lebih sadar, reflektif, dan bertanggung jawab. Alcantar (2022) mengungkapkan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan di kalangan mahasiswa Latinx melalui pendidikan tinggi berperan penting dalam membentuk kesadaran politik yang lebih mendalam dan mengarah pada keterlibatan yang lebih aktif dalam masalah sosial. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga mendorong refleksi kritis terhadap isu-isu sosial dan politik, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas partisipasi politik warga di tingkat lokal maupun nasional. Alcantar menyarankan bahwa institusi pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam melibatkan mahasiswa dalam pelayanan publik yang lebih luas, yang dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih positif. Warga menjadi lebih aktif dalam musyawarah desa/kelurahan, terlibat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan lokal, serta menunjukkan perilaku elektoral yang lebih kritis terhadap isu, program, dan rekam

jejak kandidat. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi kewarganegaraan bukan hanya berfungsi sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai modal sosial yang mendorong hadirnya kewargaan kritis (*critical citizenship*) di tingkat akar rumput.

PKn kemasyarakatan sebagai jembatan antara kerangka normatif negara dan praktik kewargaan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa model PKn kemasyarakatan berbasis komunitas dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai normatif kewarganegaraan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan praktik kewargaan dalam keseharian warga. Forum warga (RT/RW, desa/kelurahan, organisasi keagamaan dan komunitas sipil) yang selama ini cenderung administratif dapat ditransformasikan menjadi ruang belajar kewargaan yang berkelanjutan melalui pendekatan dialogis, reflektif, dan berbasis aksi sosial. Implikasinya, PKn tidak lagi dipahami semata sebagai mata pelajaran di kelas, melainkan sebagai gerakan pendidikan kemasyarakatan yang strategis untuk memperkuat demokrasi lokal dan membangun warga negara yang aktif serta bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Studi penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi kewarganegaraan warga di tingkat akar rumput masih berada pada kategori rendah–sedang, dengan pola partisipasi politik yang cenderung prosedural dan sporadis meskipun kerangka hukum dan kelembagaan demokrasi telah relatif mapan; melalui pendekatan mixed-method yang memadukan survei, wawancara tokoh masyarakat, dan analisis dokumen kebijakan lokal, penelitian ini berhasil memetakan secara komprehensif kondisi aktual, kebutuhan, dan problematik kewarganegaraan warga sebagai landasan empiris dan konseptual bagi perancangan model PKn kemasyarakatan berbasis komunitas untuk penguatan literasi kewarganegaraan dan partisipasi politik bermakna. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pada tahap pengembangan berikutnya prototipe model dirancang dengan menekankan penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga, internalisasi nilai dan norma demokratis, serta pelatihan keterampilan partisipatif yang kontekstual dengan dinamika sosial lokal melalui strategi pembelajaran partisipatoris; pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas lokal dianjurkan memanfaatkan peta masalah ini sebagai dasar penyusunan program pendidikan kewarganegaraan nonformal yang lebih terarah dan berkelanjutan; serta penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menguji efektivitas model melalui uji coba terbatas, desain eksperimen atau quasi-eksperimen, dan studi longitudinal di berbagai konteks komunitas agar model yang dihasilkan semakin adaptif, teruji, dan siap diimplementasikan secara lebih luas dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Alcantar, C. M. (2022). Civic Engagement of Latinx Students: The Role of Higher Education Institutions in Serving the Public Good. *Journal of Hispanic Higher Education*, *22*(3), 255-275. https://doi.org/10.1177/15381927221096541 (Original work published 2023)

Dahl, R. A. (2020). *A Preface to Economic Democracy*. *A Preface to Economic Democracy*. University of California Press. https://doi.org/10.1525/978052034

Febiantoni, F. F., Cucu Sutrisno, M., Mukhamad Murdiono, Y., Yayuk Hidayah, & Dian Satria Charismana. (2025). Development of a holistic partnership model of character education based on Android applications for junior high school students. *Golden Ratio of Social Science and Education, 5*(1), 148–166. https://doi.org/10.52970/grsse.v5i1.1153

France, G., & Martini, M. (2019). Brazil : Overview of Corruption and Anti-Corruption. Retrieved from https://knowledgehub.transparency.org/help

desk/brazil-overview-of-corruption-and-anti-corruption-1

Gal, A. (2024). A hackathon as a promoter of environmental citizenship among fifth-grade students—the attitudes of students, educators, ornithologists, and people working in high-tech. *Education, Citizenship and Social Justice*, *20*(2), 319-341. https://doi.org/10.1177/17461979241253556 (Original work published 2025)

Jang, H., Tang, F., Fusco, R. A., Engel, R. J., & Albert, S. M. (2021). Grandparenting, Social Relations, and Mortality in Old Age. *Research on Aging*, *44*(3-4), 265-275. https://doi.org/10.1177/01640275211015433

Keegan, P. (2021). Critical Affective Civic Literacy: A Framework for Attending to Political Emotion in the Social Studies Classroom. *The Journal of Social Studies Research*, *45*(1), 15-24. https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.06.003

Knowles, R. T. (2018). Teaching Who You Are: Connecting Teachers' Civic Education Ideology to Instructional Strategies. *Theory and Research in Social Education*, *46*(1), 68–109. https://doi.org/10.1080/00933104.2017.1356776.

Langmead, K. (2019). *Exploring the Performance of Democracy and Economic Diversity in Worker Cooperatives*. *Sheffield Hallam University*.

Mirra, N., & Garcia, A. (2022). Guns, Schools, and Democracy: Adolescents Imagining Social Futures Through Speculative Civic Literacies. *American Educational Research Journal*, *59*(2), 345-380. https://doi.org/10.3102/00028312221074400 (Original work published 2022)

Nestler, S., Lüdtke, O., & Robitzsch, A. (2021). Analyzing Longitudinal Social Relations Model Data Using the Social Relations Structural Equation Model. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, *47*(2), 231-260. https://doi.org/10.3102/10769986211056541

Polizzi, G. (2021). Internet users' utopian/dystopian imaginaries of society in the digital age: Theorizing critical digital literacy and civic engagement. *New Media & Society*, *25*(6), 1205-1226. https://doi.org/10.1177/14614448211018609 (Original work published 2023)

Putri, S. A., Sukariyadi, T. I., & Feriandi, Y. A. (2025). Penanaman karakter peduli lingkungan dan peduli sosial melalui program Adiwiyata di SMP Negeri 3 Ponorogo. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 13*(2), halaman-halaman artikel. https://jurnal.ppkn.org/index.php/jppkn/article/view/14499/pdf

Stray, J. (2019). Institutional counter-disinformation strategies in a networked democracy. In *The Web Conference 2019 - Companion of the World Wide Web Conference, WWW 2019* (pp. 1020–1025). Association for Computing Machinery, Inc. https://doi.org/10.1145/3308560.3316740

Wu (吴遵民), Z. (2020). China's Experiences in Developing Lifelong Education, 1978–2017. *ECNU Review of Education*, *4*(4), 857-872. https://doi.org/10.1177/2096531120953959 (Original work published 2021)